

**ANALISIS VARIANS BELANJA, PERTUMBUHAN BELANJA,
KESERASIAN BELANJA, EFISIENSI BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN BAPPEDA KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR



Oleh :

FIKO FERDIAN ISMET
NIM. 1109134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

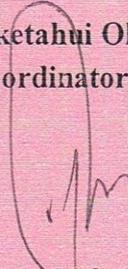
PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS VARIANS BELANJA, PERTUMBUHAN
BELANJA, KESERASIAN BELANJA, EFISIENSI BELANJA PADA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KOTA PADANG**

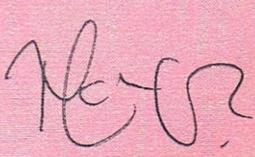
Nama : Fiko Ferdian Ismet
NIM : 1109134
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2015

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing


Halkadri Fitra, SE, MM.
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

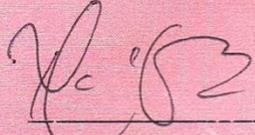
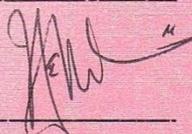
ANALISIS VARIANS BELANJA, PERTUMBUHAN
BELANJA, KESERASIAN BELANJA, EFISIENSI BELANJA PADA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KOTA PADANG

Nama : Fiko Ferdian Ismet
BP/NIM : 2011/1109134
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Mei 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Halkadri Fitra, SE, MM.	
2. Anggota	: Henry Agustin, SE, Ak. M.Sc	
3. Anggota	: Herina Helmy, SE, Ak, M.S.A. Ak	

ABSTRAK

FIKO FERDIAN ISMET : Analisis Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang

Pembimbing : Halkadri Fitra SE , MM . Ak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selisih antara belanja dan anggaran serta mengetahui bagaimana peningkatan kinerja anggaran belanja Bappeda Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kota Padang dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang serta peraturan perundangan yang mengatur.

Data yang digunakan dalam menganalisis adalah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Bappeda Kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2013. Teknis analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis belanja yang meliputi, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran Bappeda kota Padang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :a). Pada analisis varians terdapat selisih rata rata belanja dengan realisasinya 1.209.037.184,33. Pada analisis pertumbuhan belanja terdapat rata rata sebesar 13,75%. Pada analisis keserasian belanja operasi dan belanja modal menunjukkan rasio sebesar 96% untuk belanja operasi, dan 3% untuk belanja modal. Sedangkan untuk analisis porposisi belanja langsung dan tidak langsung telah sesuai dengan ketentuan, bahwa belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.d) Pada tahun 2010-2012 realisasi belanja pada analisis efisiensi belanja Bappeda adalah 92%.

KATA PENGANTAR



Tiada kata terucap selain syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan program DIII pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang (UNP).

Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi , penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

“ANALISIS VARIANS BELANJA, PERTUMBUHAN BELANJA, KESERASIAN BELANJA, EFISIENSI BELANJA PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KOTA PADANG”.

Untuk segala bantuan yang penulis dapatkan dalam pembuatan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. YuniaWardi. Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvirita, SE M.Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE, M.M ,Ak selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang dengan bijaksana dan penuh kesabaranmemberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu dosen penguji tugas akhir yaitu Bapak Henri Agustin, Se, M.Sc, Ak dan Ibu Herlina Helmy, SE,M.Si, Ak yangtelah memberikan kritik dan saran kepada penulis.

5. Seluruh dosen, staff pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada Orang tua, Ayah dan Ibunda yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tidak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT mencatatkan nama mereka sebagai penghuni syurga Amiin.
9. Untuk saudara-saudara ku yang telah banyak mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan serta kasih sayang.
10. Kepada teman teman D3 Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.

Padang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Laporan Keuangan	8
2.2 Laporan Realisasi Anggaran	13
2.3 Pengukuran Kinerja	18
2.4 Belanja	24
BAB III. PENDEKATAN PENELITIAN	
3.1 Bentuk Penelitian Tugas Akhir	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Rancangan Penelitian	34

3.4 Jenis dan sumber data	35
3.5 Tahap Pengumpulan data	35
3.6 Objek Penelitian	36
3.7 Teknis Analisis Data	36

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Profil Instansi	40
A. Gambaran Umum Bappeda	40
B. Visi dan Misi Bappeda	40
C. Struktur organisasi Bappeda.....	41
D. Tugas Pokok Dan Fungsi	42
E. Sub Bagian Pemograman.....	47
F. Bagian Ekonomi.....	48
G. Bidang sosial dan budaya	53
H. Bidang Fisik dan prasarana	57
I. Bidang Litbang Dan statistik	61
J. Bidang Pengembangan wilayah.....	65
4.2 Pembahasan	70
4.2.1 Analisis Varians Belanja	70
4.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja	71
4.2.3 Analisis Keserasian Belanja.....	72
4.2.4 Rasio Efisiensi Belanja	74

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1	Kriteria Rasio Efisiensi Belanja Menurut Pemendagri33
2	Varians Belanja Tahun 2011-201370
2	Pertumbuhan Belanja Tahun 2011-201371
3	Belanja Operasi dan Belanja Modal 2011-201372
4	Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2011-201373
5	Efisiensi Belanja Tahun 2011-201374

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:Struktur organisasi BAPPEDA.....	41
-------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Observasi
2. Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Padang 2011-2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif di Indonesia maka pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintahan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Kedua undang undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Darise, 2008 : 1)

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan berlakunya otonomi daerah kabupaten/kota, pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dan anggaran sebagai alat motivasi (Mardiasmo, 2005: 63)

Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2005: 21)

Laporan keuangan organisasi sektor publik meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, sesuai dengan ketentuan UU No.32 dan 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun 2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPI Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berbentuk Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Bastian: 2010)

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit,

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun. 2005, Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk memberikan dana kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan

pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi 2010: 135)

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data inilah pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan dan pelaporan realisasi anggaran ini dilaksanakan setiap semester secara manual serta pembuatannya berkesinambungan.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat

belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010: 155)

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran yang penulis terima selama mengadakan observasi di Bappeda Kota Padang, Anggaran maupun Belanja di Bappeda Kota Padang setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana LRA Bappeda Kota Padang setiap tahunnya. Pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis belanja daerah untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara efisien dan efektif. Untuk menganalisis anggaran khususnya analisis belanja daerah yang menggunakan analisis rasio keuangan terhadap perhitungan belanja, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain berupa: 1) Analisis Varians Belanja yaitu analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran, 2) Analisis Pertumbuhan Belanja yaitu untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. 3) Analisis Keserasian Belanja yaitu untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, 4) Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ **Analisis Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang.**”

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan maka masalah pokok yang timbul dari penelitian yang ditemukan penulis adalah:

1. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis varians belanja?
2. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis pertumbuhan belanja?
3. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis keserasian belanja?
4. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari efesisensi belanja?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari analisis varians belanja.
2. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja.

3. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari analisis keserasian belanja.
4. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio efisiensi belanja.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk penulis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi D3 Akuntansi (Sektor Publik) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

2. Untuk akademis

Pengembangan ilmu dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya tentang Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Untuk instansi yang diteliti

- a. bagi pemerintah daerah, dapat memberikan sumbangan terhadap badan atau dinas yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan analisis Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan adalah laporan yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset kewajiban dan ekuitas dana.

2.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang serupa bagi sejumlah pengguna yang berberda-beda (Afiah, 2010 : 14).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiyai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3. Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiyai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4. Macam dan Bentuk Laporan Keuangan

2.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.4.2. Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

2.1.4.3. Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

2.1.4.4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Perda APBD.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor pemerintahan.

Menurut Permendagri No.4 Tahun 2008 Laporan Realisasi Anggaran adalah:

“Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indra Bastian (2001: 79) mengemukakan ”Anggaran dapat diinterpretasi sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa anggaran merupakan penghubung antar sumber daya keuangan dengan perilaku manusia. Sehingga tujuan utama untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya mencapai tujuan organisasi yang disusun dalam unit kesatuan dalam periode waktu tertentu.

2.2.1. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), isi Laporan Realisasi Anggaran mencakup hal sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur berbagai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan anggarannya.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan –LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan netto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA /SiKPA)

2.2.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapora yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja daerah.

2.2.4. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan
- c. Periode yang dicakup
- d. Mata uang pelaporan
- e. Satuan angka yang digunakan

2.2.5 Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.2.6. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik kedalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Definisi kinerja menurut Indra Bastian (2006: 329) adalah:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi”.

Sedangkan menurut Larry D Stout (1993) dalam Bastian menyatakan:

“Pengukuran/ penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”.

Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasar kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

2.3.1. Penilaian kinerja

Menurut Mardiasmo (2005: 122) menjelaskan bahwa penilaian kinerja memiliki tujuan atau manfaat bagi manajemen sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja organisasi.
- e. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- f. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- g. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.3.2. Tujuan penilaian kinerja sektor publik

Menurut Mahmudi (2007: 14) menjelaskan tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu :

- a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.3.3. Aspek- aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Indra Bastian (2001: 331) pengukuran kinerja dilakukan untuk aspek- aspek berikut ini:

- a. Aspek Finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*.Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

- b. Kepuasan Pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

c. Operasi dan Pasar Internal

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

d. Kepuasan Pegawai

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

e. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

2.3.4. Sistem manajemen kinerja sektor publik

Menurut Mahmudi (2007: 16) manajemen kinerja membutuhkan proses sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain system manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal.

Tahap- tahap system manajemen kinerja meliputi:

- a. Tahap perencanaan kinerja
- b. Tahap pelaksanaan kinerja
- c. Tahap penilaian kinerja.
- d. Tahap *review* kinerja
- e. Tahap perbaikan kinerja

2.3.5. Pelaporan Kinerja

Menurut Mahmudi (2007: 71) pelaporan kinerja merupakan refleksi

kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam kinerja program pemerintah serta unitnya.

Pada tahap implementasi, bagian akuntansi melakukan proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan. Informasi akuntansi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi harus dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja nonkeuangan. Aspek kinerja nonkeuangan dalam organisasi sektor publik banyak menghasilkan *output* yang sifatnya tidak berwujud, seperti pelayanan publik yang sulit diukur kinerjanya dari aspek finansial. Pelaporan kinerja tersebut akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

2.3.6. Evaluasi Kinerja

Menurut Mahmudi (2007: 71) evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar

kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat. Cara-cara evaluasi kinerja menurut Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam buku Pengukuran Kinerja adalah dengan membandingkan antara:

- a. Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang nyata.
- b. Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya.
- c. Raelisasi dan dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.
- d. Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.
- e. Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

Dalam akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan substansinya, maka perlu akuntabilitas, kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimasukkan untuk membantu kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas,

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintah.

2.4. Belanja

2.4.1. Pengertian Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas dari rekening kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD.

2.4.2. Klasifikasi Belanja

Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri yang

menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis.

Menurut Bastian (2006: 151), “ Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank”. Berdasarkan manfaatnya, biaya yang terjadi pada suatu periode dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasi dan biaya non operasi.

Untuk lebih menguatkan lagi secara hukum, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengelompokan belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dituangkan dalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 meliputi:

- a. Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah
7. Belanja bantuan social

8. Belanja lain-lain

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah meliputi:

a) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang
- 3) Belanja bunga
- 4) Belanja subsidi
- 5) Belanja hibah
- 6) Belanja bantuan sosial

b) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi.

- 1) Belanja modal untuk perolehan tanah
- 2) Belanja modal untuk perolehan gedung dan bangunan
- 3) Belanja modal untuk perolehan peralatan
- 4) Belanja modal untuk perolehan asset tak berwujud

c) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

b. Klasifikasi berdasarkan ekonomi, klasifikasi ini berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

1. Belanja untuk pemerintahan pusat yaitu belanja per Kementerian Negara/Lembaga beserta unit Organisasi bawahannya.
 2. Belanja untuk pemerintahan daerah meliputi:
 - 1) Belanja Sekretariat DPRD
 - 2) Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota
 - 3) Dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota
 - 4) Lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota
- c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu:
1. Belanja pelayanan umum
 2. Belanja pertahanan
 3. Belanja ketertiban dan keamanan
 4. Belanja ekonomi
 5. Belanja perlindungan lingkungan hidup
 6. Belanja perumahan dan pemukiman
 7. Belanja kesehatan
 8. Belanja pariwisata dan budaya
 9. Belanja pendidikan
 10. Belanja perlindungan social

2.4.3. Analisis Pengukuran Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Se jauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. (Mahmudi, 2007: 142).

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara dengan cara:

2.4.3.1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi

dua jenis, yaitu: 1) selisih menguntungkan, dan 2) selisih tidak menguntungkan. Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut selisih menguntungkan, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan selisih tidak menguntungkan. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamankan dalam anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab varians tersebut DPRD perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien. (Mahmudi, 2007: 143).

Kita dapat melakukan analisis pertumbuhan belanja dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki

kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. (Mahmudi, 2007: 146)

Maka kita dapat melakukan analisis pertumbuhan belanja dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thnt} = \frac{\text{Belanja Thnt} - \text{Belanja Thnt-1}}{\text{Realisasi Belanja Thnt-1}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.3. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa analisis belanja operasi dan belanja modal dan analisis belanja langsung dan tidak langsung. (Mahmudi, 2007: 148)

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun ,antara lain pembelian tanah,gedung,mesin dan kendaraan,peralatan,instalansi dan jaringan,furniture,software dan lain lain.(Mahmudi,2010: 96)

Belanja operasi adalah belanja yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari atau bersifat rutin,yang meliputi antara lain belanja pegawai,belanja administrasi dan umum,belanja pemasaran,belanja bunga,belanja subsidi,belanja hibah dan bantuan sosial,bantuan keuangan.(Mahmudi,2010: 99)

Menurut Mahmudi(2007: 150) “Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu sekitar 69-90% dan proporsi belanja modal terhadap belanja daerah adalah antara 5-20%”.

Maka kita dapat melakukan perhitungan analisis belanja modal dan belanja operasi dengan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Rasio belanja modal} \\ \text{Terhadap total belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Rasio belanja operasi} \\ \text{Terhadap total belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{array}$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. (Mahmudi, 2010: 95)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga. (Mahmudi, 2010: 96)

Menurut Mahmudi (2007: 151) “Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan”.

Maka kita dapat melakukan perhitungan analisis belanja langsung dan tidak langsung dengan rumus :

$$\text{Rasio belanja langsung Terhadap total belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja tidak langsung Terhadap total belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada

standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran. (Mahmudi,2007: 152)

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

Tabel kriteria rasio efisiensi belanja menurut Permendagri nomor 690.900-327 tahun 1996 :

No	Rasio	Kriteria
1	< 60%	Sangat efisien
2	60%-80%	Efisien
3	80%-90%	Cukup efisien
4	90%-100%	Kurang efisien
5	>100%	Tidak efisien

Sumber: Permendagri nomor 690.900-327 tahun 1996

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis pengukuran kinerja belanja pada laporan realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kinerja belanja BAPPEDA Kota Padang dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena dari tahun 2011-2013 realisasi belanja tidak melebihi dari yang di anggarkan.
2. Pertumbuhan belanja BAPPEDA Kota Padang menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 13,75%.
3. Sebagian besar belanja BAPPEDA Kota Padang untuk tahun 2011-2013 dialokasikan lebih besar ke belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal yaitu sebesar dengan rasio 96% untuk belanja operasi dan 3% untuk belanja modal. Selanjutnya untuk tahun 2011-2013 dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu dengan rasio sebesar 76,51% dan 23,49% untuk belanja tidak langsung.
4. Kinerja belanja BAPPEDA Kota Padang dilihat dari analisis efisiensi belanja secara umum dapat dikatakan kurang efisien yang dapat dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2011-2013 sebesar 92% dan berada pada kategori kurang efisien.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi BAPPEDA Kota Padang

BAPPEDA Kota Padang diharapkan dapat lebih mampu dan selektif dalam penyusunan rencana kerja serta pengeluaran kas untuk belanja agar terciptanya keserasian belanja dan efesiensi belanja dilingkungan BAPPEDA Kota Padang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian, agar analisis terhadap kinerja anggaran belanja mendapatkan gambar kinerja yang jelas. Dan juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2010. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Indeks.
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPEF.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- _____, *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.



79

PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang Jalan By Pass KM 8 Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.02.374 /Kesbang.Pol/2015

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang menerbitkan rekomendasi dengan :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari : PD I, Fakultas Ekonomi UNP
Nomor : 816/UN35.1.7/PP/2015 tanggal 11 Februari 2015

b. Surat Pernyataan Bertanggung jawab penelitian Ybs, tanggal 20 Februari 2015

pada prinsipnya dapat diberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL, Pengalaman Belajar Lapangan di dalam wilayah Kota Padang kepada :

Nama	: Fiko Ferdian Ismet
Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 9 April 1992
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Prof Hamka No.16 Air Tawar Barat
Maksud Penelitian	: Untuk menyelesaikan tugas akhir
Lama Penelitian	: 1(satu) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Analisis Anggaran Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang.
Tempat Penelitian	: DPKA Kota Padang.
Anggota Rombongan	: --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama penelitian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.
2. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman ditengah masyarakat.
3. Menyerahkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbangpol Kota Padang dalam bentuk laporan yang dijilid dan softcopynya.
4. Apabila terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dari maksud tujuan penelitian ini dengan otomatis Rekomendasi Penelitian ini tida berlaku dan tanggungjawab sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 20 Februari 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG
WALIKOTA PADANG
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KANTOR KESBANG POL
KOTA PADANG

ERI JASMAN, S.Sos, MM
NIP.19641117 1989 03 10001

Diteruskan kepada Yt

1. PD I, Fakultas Ekonomi UNP
2. Yang bersangkutan
3. Pertinggal

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANSASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01 00 00 4	PENDAPATAN	-	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	
1.06 1.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	15,092,743,566.16	14,039,990,560.00	(1,052,753,006.16)	93.02	
1.06 1.06.01 00 00 5	Belanja Tidak Langsung	3,213,451,946.16	3,128,777,151.00	(84,674,795.16)	97.36	
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	3,213,451,946.16	3,128,777,151.00	(84,674,795.16)	97.36	
1.06 1.06.01 00 00 5 2	Belanja Langsung	11,879,291,620.00	10,911,213,409.00	(968,078,211.00)	91.85	
1.06 1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,331,514,320.00	1,281,661,237.00	(49,853,083.00)	96.26	
1.06 1.06.01 01 01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7,500,000.00	7,497,500.00	(2,500.00)	99.97	
1.06 1.06.01 01 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	7,497,500.00	(2,500.00)	99.97	
1.06 1.06.01 01 02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SOA DAN LISTRIK	71,700,000.00	61,364,868.00	(10,335,132.00)	85.59	
1.06 1.06.01 01 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71,700,000.00	61,364,868.00	(10,335,132.00)	85.59	
1.06 1.06.01 01 06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6,000,000.00	3,758,250.00	(2,241,750.00)	62.64	
1.06 1.06.01 01 06 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	3,758,250.00	(2,241,750.00)	62.64	
1.06 1.06.01 01 09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	40,250,000.00	40,230,000.00	(20,000.00)	99.95	
1.06 1.06.01 01 09 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	40,250,000.00	40,230,000.00	(20,000.00)	99.95	
1.06 1.06.01 01 10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	115,000,000.00	114,986,500.00	(13,500.00)	99.99	
1.06 1.06.01 01 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	115,000,000.00	114,986,500.00	(13,500.00)	99.99	
1.06 1.06.01 01 11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	165,000,000.00	164,929,300.00	(70,700.00)	99.96	
1.06 1.06.01 01 11 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165,000,000.00	164,929,300.00	(70,700.00)	99.96	
1.06 1.06.01 01 12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15,000,000.00	14,386,000.00	(614,000.00)	95.91	
1.06 1.06.01 01 12 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,386,000.00	(614,000.00)	95.91	
1.06 1.06.01 01 13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	232,997,320.00	212,035,250.00	(20,962,070.00)	91.00	
1.06 1.06.01 01 13 5 2 1	Belanja Pegawai	850,000.00	0.00	(850,000.00)	-	
1.06 1.06.01 01 13 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23,795,500.00	23,785,250.00	(10,250.00)	99.96	
1.06 1.06.01 01 13 5 2 3	Belanja Modal	208,351,820.00	188,250,000.00	(20,101,820.00)	90.35	
1.06 1.06.01 01 15	PENYEDIAAN BARANG BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30,000,000.00	28,945,000.00	(1,055,000.00)	96.48	
1.06 1.06.01 01 15 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	17,245,000.00	0.00	95.81	
1.06 1.06.01 01 15 5 2 3	Belanja Modal	12,000,000.00	11,700,000.00	(300,000.00)	97.50	
1.06 1.06.01 01 17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50,000,000.00	49,779,750.00	(220,250.00)	99.56	
1.06 1.06.01 01 17 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	49,779,750.00	(220,250.00)	99.56	
1.06 1.06.01 01 18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	525,000,000.00	518,757,319.00	(6,242,681.00)	98.81	
1.06 1.06.01 01 18 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	525,000,000.00	518,757,319.00	(6,242,681.00)	98.81	
1.06 1.06.01 01 20	PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR	15,000,000.00	14,976,500.00	(23,500.00)	99.84	
1.06 1.06.01 01 20 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,976,500.00	(23,500.00)	99.84	
1.06 1.06.01 01 21	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK	28,091,000.00	28,091,000.00	-	100.00	
1.06 1.06.01 01 21 5 2 1	Belanja Pegawai	28,091,000.00	28,091,000.00	-	100.00	

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 48

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.223.530.432,54	14.334.574.675,00	(1,888,955,757.54)	88.36	
00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.599.604.382,54	3.399.005.104,00	(200,599,278.54)	94.43	
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.599.604.382,54	3.399.005.104,00	(200,599,278.54)	94.43	Berdasarkan PP No.15 Tahun 2012, tentang Perubahan Keempat Belas atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.21, tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Dirjen Perben No Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang
00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.623.926.050,00	10.935.569.571,00	(1,688,356,479.00)	86.63	
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.656.064.000,00	1.514.849.274,00	(141,214,726.00)	91.47	
01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.550.000,00	8.181.000,00	(369,000.00)	95.68	
01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.181.000,00	(369,000.00)	95.68	
01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	127.800.000,00	100.313.613,00	(27,486,387.00)	78.49	
01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	100.313.613,00	(27,486,387.00)	78.49	
01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.250.000,00	3.939.050,00	(3,310,950.00)	54.33	
01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	3.939.050,00	(3,310,950.00)	54.33	
01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	50.150.000,00	50.090.000,00	(60,000.00)	99.88	
01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.150.000,00	50.090.000,00	(60,000.00)	99.88	

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2010

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7
1.06.01 00 00 4	PENDAPATAN	-	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	
1.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	11,322,688,665.28	10,336,098,458.00	(986,590,207.28)	91.29	
1.06.01 00 00 5 1	Belanja Tidak Langsung	2,836,399,865.28	2,790,696,370.00	(45,703,495.28)	98.39	
1.06.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	2,836,399,865.28	2,790,696,370.00	(45,703,495.28)	98.39	
1.06.01 00 00 5 2	Belanja Langsung	8,486,288,800.00	7,545,402,088.00	(940,886,712.00)	88.91	
1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	985,726,600.00	895,049,338.00	(90,677,262.00)	90.80	
1.06.01 01 01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6,000,000.00	5,178,000.00	(822,000.00)	86.30	
1.06.01 01 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,178,000.00	(822,000.00)	86.30	
1.06.01 01 02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	76,388,000.00	36,410,775.00	(39,977,225.00)	47.67	
1.06.01 01 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	76,388,000.00	36,410,775.00	(39,977,225.00)	47.67	
1.06.01 01 06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7,000,000.00	877,000.00	(6,123,000.00)	12.53	
1.06.01 01 06 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	877,000.00	(6,123,000.00)	12.53	
1.06.01 01 09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	38,900,000.00	36,283,500.00	(2,616,500.00)	93.27	
1.06.01 01 09 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	38,900,000.00	36,283,500.00	(2,616,500.00)	93.27	
1.06.01 01 10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70,000,000.00	69,596,400.00	(403,600.00)	99.42	
1.06.01 01 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000.00	69,596,400.00	(403,600.00)	99.42	
1.06.01 01 11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	98,840,800.00	98,743,175.00	(97,625.00)	99.90	
1.06.01 01 11 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	98,840,800.00	98,743,175.00	(97,625.00)	99.90	
1.06.01 01 12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10,000,000.00	9,023,000.00	(977,000.00)	90.23	
1.06.01 01 12 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,023,000.00	(977,000.00)	90.23	
1.06.01 01 13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	179,645,000.00	174,855,000.00	(4,790,000.00)	97.33	
1.06.01 01 13 5 2 3	Belanja Modal	179,645,000.00	174,855,000.00	(4,790,000.00)	97.33	
1.06.01 01 15	PENYEDIAAN BARANG BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35,000,000.00	34,141,000.00	(859,000.00)	97.55	
1.06.01 01 15 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	14,040,000.00	13,491,000.00	(549,000.00)	96.09	
1.06.01 01 15 5 2 3	Belanja Modal	20,960,000.00	20,650,000.00	(310,000.00)	98.52	
1.06.01 01 17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23,000,000.00	22,917,588.00	(82,412.00)	99.64	
1.06.01 01 17 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	22,917,588.00	(82,412.00)	99.64	
1.06.01 01 18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	352,800,000.00	352,680,600.00	(119,400.00)	99.97	
1.06.01 01 18 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	352,800,000.00	352,680,600.00	(119,400.00)	99.97	
1.06.01 01 19	PENDUKUNG PELAYANAN KANTOR / KOORDINASI DALAM DAERAH	5,300,000.00	5,000,000.00	(300,000.00)	94.34	
1.06.01 01 19 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,300,000.00	5,000,000.00	(300,000.00)	94.34	
1.06.01 01 20	PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN	5,000,000.00	4,965,500.00	(34,500.00)	99.31	
1.06.01 01 20 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	4,965,500.00	(34,500.00)	99.31	
1.06.01 01 21	PENINGKATAN JASA PELAYANAN PUBLIK	14,312,800.00	14,312,800.00	-	100.00	
1.06.01 01 21 5 2 1	Belanja Pegawai	14,312,800.00	14,312,800.00	-	100.00	

PEMERINTAH KOTA PADANG
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ORGANISASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
1.06.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	-	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	
1.06.06.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	12,746,176,315.29	12,060,773,526.00	(685,402,789.29)	94.62	
1.06.06.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,017,501,515.29	2,952,940,340.00	(64,561,175.29)	97.86	
1.06.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3,017,501,515.29	2,952,940,340.00	(64,561,175.29)	97.86	
1.06.06.01	Belanja Langsung	9,728,674,800.00	9,107,833,186.00	(620,841,614.00)	93.62	
1.06.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,074,620,800.00	1,041,983,783.00	(32,637,017.00)	96.96	
1.06.06.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6,000,000.00	5,505,930.00	(494,070.00)	91.77	
1.06.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	5,505,930.00	(494,070.00)	91.77	
1.06.06.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	46,940,000.00	43,659,473.00	(3,280,527.00)	93.01	
1.06.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,940,000.00	43,659,473.00	(3,280,527.00)	93.01	
1.06.06.01.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6,000,000.00	1,040,000.00	(4,960,000.00)	17.33	
1.06.06.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	1,040,000.00	(4,960,000.00)	17.33	
1.06.06.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	35,000,000.00	34,985,000.00	(15,000.00)	99.96	
1.06.06.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	34,985,000.00	(15,000.00)	99.96	
1.06.06.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	90,000,000.00	89,957,700.00	(42,300.00)	99.95	
1.06.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,000,000.00	89,957,700.00	(42,300.00)	99.95	
1.06.06.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100,000,000.00	99,230,700.00	(769,300.00)	99.23	
1.06.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	99,230,700.00	(769,300.00)	99.23	
1.06.06.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10,000,000.00	9,983,000.00	(17,000.00)	99.83	
1.06.06.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,983,000.00	(17,000.00)	99.83	
1.06.06.01.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	200,004,000.00	194,116,000.00	(5,888,000.00)	97.06	
1.06.06.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,500,000.00	21,790,000.00	(3,710,000.00)	85.45	
1.06.06.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	174,504,000.00	172,326,000.00			
1.06.06.01.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35,000,000.00	34,660,000.00	(340,000.00)	99.03	
1.06.06.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,040,000.00	14,040,000.00	-	100.00	
1.06.06.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal	20,960,000.00	20,620,000.00	(340,000.00)	98.38	
1.06.06.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000.00	39,536,880.00	(463,120.00)	98.84	
1.06.06.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00	39,536,880.00	(463,120.00)	98.84	
1.06.06.01.01.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	440,000,000.00	438,586,550.00	(1,413,450.00)	99.68	
1.06.06.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440,000,000.00	438,586,550.00	(1,413,450.00)	99.68	
1.06.06.01.01.20	PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN	10,000,000.00	9,941,250.00	(58,750.00)	99.41	
1.06.06.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,941,250.00	(58,750.00)	99.41	
1.06.06.01.01.21	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK	12,332,800.00	11,832,800.00	(500,000.00)	95.95	
1.06.06.01.01.21.5.2.1	Belanja Pegawai	12,332,800.00	11,832,800.00	(500,000.00)	95.95	
1.06.06.01.01.22	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	43,344,000.00	28,948,500.00	(14,395,500.00)	66.79	
1.06.06.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	43,344,000.00	28,948,500.00	(14,395,500.00)	66.79	
1.06.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	447,100,000.00	429,268,515.00	(17,831,485.00)	96.01	
1.06.06.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA GEDUNG KANTOR	180,000,000.00	143,207,000.00	(36,793,000.00)	80.47	